ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY (CSR) PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)

Di ajukan oleh :

VIDYA AYU SAPUTRI.Z
4516013033

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI ,FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIALTY* (CSR)
Nama Mahasiswa	: VIDYA AYU SAPUTRI.Z
Stambuk/NIM	: 4516013033
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Tempat Penelitian	: PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)

Telah Disetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. HASANUDDIN REMMANG, SE, M.Si	**Thanwain, S.E, M.Si**

Mengetahui dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH.,MH	**Dr. FirmanMenne, SE., M.Si., Ak., CA**

TanggalPengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Vidya Ayu Saputri.Z
Nim	: 4516013033
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Judul	: Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap *Corporate Social Responsibilty* pada PT Pelabuhan Indonesia IV (persero)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar,09 September 2020

Mahasiswa yang bersangkutan

METERAI TEMPEL
TGL.
04692AHF865643008
6000
ENAM RIBU RUPIAH

.....

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP CORPORATE SOCIAL REPSONSIBILITY PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

By:

VIDYA AYU SAPUTRI.Z

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial perusahaan untuk mengatisipasi, mengelola, mengatasi, dan menetralisasi dampak-dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan baik bersifat fisik, sosial ekonomis maupun kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi dan pelaporan tanggung jawab pada PT Pelabuhan Indonesia IV (persero). Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) dan dari sumber sekunder. Dalam menguji data, metode penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas. Hasil penelitian ini adalah: 1) Perlakuan Akuntansi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terkait perseroan terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No.5/MBU/2007 terkait Program Kemitraan Bina dan Lingkungan (PKBL). 2) Pelaporan Pertanggung Jawaban Sosial PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) telah sesuai dengan PSAK NO.1 terkait penyajian laporan keuangan.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggung Jawab Sosial.

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY AT PT PELABUHAN INDONESIA IV(PERSERO)

BY :
VIDYA AYU SAPUTRI Z
Department of Accounting, Faculty of Economics and Business
Bosowa University Makassar

ABSTRACT

Corporate Social Responsibilty to anticipate, manage, overcome andneutralize negative impacts on society and the environment, both physical, socio-economic and cultural. This study aims to analyze the accounting treatment and responsibility reporting at PT Pelabuhan Indonesia IV (persero). Judging from the data source, the data collection in this study comes from financial reports at PT Pelaabuhan Indonesia IV (persero) and from secondary sources. In testing the data,the qualitative research method uses the credibility test. The result of this study are: 1) Accounting treatment is in accordance with law No. 40 of 2007 related to limited liability companies and the Minister of BUMN Regulation No.5/MBU/2007 regarding. The Community Development and Enviroment Partnership Program (PKBL). 2) PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) social respopnsibilty report is in accordance with PSAK NO 1 regarding the presentation of financial statements.

Keywords : Accounting Treatment and Social Responsibilty Reporting

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehinnga penulis dapat menyelesaaikan penulisan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY* PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)"** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki sehingga masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dalam skripsi inn, penulis sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang dalam pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dan berinovasi.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa untuk penulis. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua. Ayahanda Zulfiqar dan Ibunda Yusrianty yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendampingi setiap langkah penulis serta limpahan doa,kasih saying yang telah diberikan kepada penulis serta tak lupa juga kepada teman-teman yang memberikan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. Hasanuddin Remmang, S.E, M.Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Thanwain,S.E, M.Si selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahannya berupa kritik

dan saran yang membangun dan memotivasi yang telah diberikan dari melakukan proposal hingga ketahap penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE. M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Firman Manne, SE., M.Si.,Ak.,CA, sebagai ketua program, studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar.
3. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan tulus dan sabar kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Segenap Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Makassar yang telah membantu penulis baik dalam menyelesaikan administrasi maupun memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
5. Bapak Prasetiadi selaku direktur utama PT Pelabuhan Indonesia IV (persero), atas pemberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau.
6. Teman-Teman angkatan 2016 fakultas ekonomi universitas bosowa Makassar yang selama ini berjuang kurang lebih 4 tahun lamanya khususnya teman kelas saya Akuntansi A yang dari semester 1 sampai akhir tidak terpisahkan apapun itu.
7. Terakhir, teman terdekat saya yang tidak bisa di sebut satu-persatu. Terima kasih selalu mengingatkan , dukungan dan doanya . Semoga semua berjalan dengan lancar.

Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin yaa rabbal alamin.

Makassar, 09 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

PENYATAAN KEORSINILAN..... iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR TABEL..... xii

DAFTAR LAMPIRAN.....

.....xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
2.1 Rumusan Masalah..... 5
3.1 Tujuan Penelitian..... 5
4.1 Manfaat Penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7

2.1 Kerangka teori..... 7
2.2 Kerangka pikir..... 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 36

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 36
3.2 Jenis dan Sumber Data..... 36
3.3 Metode Pengumpulan Data..... 37
3.4 Metode Analisis 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 39

4.1 Gambaran Perusahaan..... 44

4.2 Deskripsi Data..... 54

4.3 Analisis Data..... 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 63

5.1 Kesimpulan..... 63

5.2 Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 44
Gambar 4.3 Realisasi CSR Tahun 2017..... 60
Gambar 4.4 Realisasi CSR Tahun 2018..... 61
Gambar 4.5 Realisasi CSR Tahun 2019..... 62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Realisasi Csr Dari Tahun 2017 - 2019..... 55

UNIVERSITAS
BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi..... 68
Lampiran 2. Laporan Beban Umum dan Administrasi..... 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat Era globalisasi sekarang banyak organisasi atau perusahaan yang menyadari bahwa pentingnya penerapan pertanggung jawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana salah satu strategi perusahaan memperoleh keuntungan secara tidak langsung dari masyarakat dan juga memberikan kestabilan keuangan perusahaan. Sebelumnya perusahaan dan masyarakat sangat terkait dimana keduanya sangat menentukan sebuah keberhasilan perusahaan.

Tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibilty* (CSR), diatur secara tegas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.

Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas terbentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan social harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislative berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang di akibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya.

Setiap perusahaan tentunya memilki tujuan atas semua kegiatan yang mereka lakukan, baik untuk menguntungkan ataupun mengembangkan usahanya

tersebut. Namun untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan, tentunya tidak akan lepas dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Segala jenis usaha perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat Perusahaan dan masyarakat memilki hubungan timbale balik, dimana keduanya saling memberi dan membutuhkan. Oleh sebab itu,perusahaannya yang ingin tetap melaksanakan kegiatannya secara berkelanjutan maka perusahaan harus mengefisienkan dalam penggunaan sumber daya alam dan perusahaan harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tanggung jawab social perusahaan terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatisipasi, mengelola, mengatasi dan menetralisasi dampak-dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan, baik yang bersifatfisik, social ekonomis maupun kultural yang kemungkinan timbul dari operasi yang dilakukan perusahaan.

Upaya mewujudkan tanggung jawab social memang sering kali harus berhadapan dengan beragam permasalahan baik yang berasal dari lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternal. Secara ideal, perusahaan seharusnya menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai dampak operasi perusahaan sebelum menyelesaikan persoalan lainnya. Misalnya pencemaran lingkungan, kebisingan dan kerusakan ekosistem. Salah satu bentuk pertanggung jawaban perusahaan harus memiliki akuntabilitas dalam penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility)*

Menurut Rusdianto (2013) penerapan CSR (*Corporate Social Responsibilty*) di Indonesia merupakan pencerminan akan perlunya akuntanbilitas perseroan atas pelaksaan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibilty*). Akuntabilitas perusahaan menjadi penting dalam penerapan CSR (*Corporate Social Responsibilty*) agar informasi keuangan terkait aktivitas CSR (*Corporate Social Responsibilty*) menjadi transparan.

Elkington dalam Lako (2013:65) menyebutkan system pelaporan yang menyertakan informasi CSR (*Corporate Social Responsibilty*) sebagai *triple bottom line reporting* yaitu pelaporan yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) dari suatu perusahaan yang bertujuan agar *stakeholder* mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja, risiko dan prospek bisnis, serta keberlangsungan hidup perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan.Di dalam PSAK terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau biasa disebut *general purpose financial statements*. Informasi serta data mengenai entitas yang disajikan PSAK adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, serta beban. PSAK juga menyajikan entitas berupa kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, keuntungan dan juga kerugian, hingga arus kas dan informasi lainnya yang ada pada catatan laporan keuangan.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Dalam

menjalankan usahanya PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mempunyai Tanggung jawab social kepada masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang diterapkan yaitu melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibilty* (CSR).

Komitmen dari penerapan misi Perseroan dalam bidang *Corporate Social Responsibilty* (CSR) di manifestasikan melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis dengan tujuan Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perseroan dengan masyarakat.

1. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang professional serta mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, baik terkait atau tidak terkait dengan bisnis Pereroan melalui penyaluran dana dan pembinaan berkesinambungan, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
2. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan mengenai Analisis perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan mengukur kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu penelitian mengangkat judul "**Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* telah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan ?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui standar akuntansi yang di terapkan dalam *Corporate Social Responsibilty* (CSR) Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian *Corporate Social Responsibilty* (CSR) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar

   Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak akademisi.

2. Kegunaan Peneliti yaitu utama bagi peneliti

Dapat menambah ilmu dan wawasan terhadap pertanggung jawaban social dalam suatu perusahaan dan membantu dalam meningkatkan kreativitas serta rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

3. Bagi Masyarakat
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai sumber informasi dalam mengetahui perlakuan akuntansi pada *Corporate Social Responsibiliity* (CSR).
4. Kegunaan bagi pembaca/peneliti selanjutnya

   Untuk memberikan referensi pada peneliti selanjutnya agar mempermudah dalam menghasilkan sebuah penelitian. dan memberikan informasi tentang pertanggung jawaban sosial .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Weygandt dkk. "Akuntansi yaitu suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan,mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna kepentingan.Salah satu unsur penting dalam mengkomunikasikan peristiwa- peristiwa ekonomi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang telah dilaporkan". Terdapat banyak ragam dan definisi akuntansi. Ajaran akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan bisnis, demikian juga dengan pengertian akuntansi. Berikut diuraikan beberapa pengertian akuntansi yang dikembangkan oleh beberapa badan berwenang dalam Sirait''(2018,18):

1. American Institute Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

2. Accounting Principle Board (APB) mengartikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa alternatif.

3. Financial Accounting Standart Board (FASB) mendefinisikan akuntansi adalah pengetahuan badan dan fungsinya terkait dengan

sistematika pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, peringkasan, penganalisisan, penafsiran dan tuntutan informasi yang andal dan signifikan meliputi transaksi dan kejadian-kejadian yang terkait, setidaknya untuk sebagian dari karakter keuangan yang diperlukan oleh manajemen dan operasionalisasi suatu entitas untuk pelaporan yang harus disampaikan guna memenuhi fiduciary dan tanggung jawab lainnya.

2.1.2 Bidang Akuntansi

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin kompleksnya masalah perusahaan yang didorong kemajuan tekhnologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang penting akan diuraikan seperti berikut dalam Sirait (2018,19)

1. Akuntansi Keuangan. disebut juga akuntansi umum (General Accounting), yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern maupun ekstern perusahaan.

2. Akuntansi Manajerial. Akuntansi manajerial menggunakan data historis maupun data taksiran untuk membantu manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan operasional mendatang.

Bidang ini mengolah kasus-kasus khusus yang dihadapi manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi.

3. Akuntansi Biaya. Merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi dan melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi

4. Akuntansi Perpajakan. Mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan.

5. Sistem Akuntansi. Merupakan bidang khusus yang berhubungan dengan penciptaan prosedur akuntansi dan peralatannya disertai penentuan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan.

6. Akuntansi Sektor Publik. Merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana.

7. Akuntansi Sosial. Akuntansi sosial secara umum bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan cost and benefit dan biaya sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan tersebut di masyarakat. Biaya sosial ini umumnya dikaitan dengan ketenagakerjaan, konsumen dan produk atau barang/jasa yang dihasilkan, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan.

8. Akuntansi Internasional. Merupakan bidang akuntansi yang khusus menyangkut masalah perdagangan internasional dari perusahaan multinasional.

9. Akuntansi Syariah. Merupakan bidang ilmu akuntansi yang berlandaskan pada nilai, etika dan syariah islam.

2.1.3 Akuntansi Sosial

Corporate social responsibility dalam akuntansi termasuk dalam cabang akuntansi sosial, dimana dapat terlihat dengan jelas dari makna CSR itu sendiri serta motivasi umum pembentukannya yang secara awam berupa kemandirian masyarakat, perbaikan nasib baik karyawan maupun masyarakat, perbaikan lingkungan, serta stabilitas keamanan dan sosial. Akuntansi sosial umumnya digunakan dalam konteks bisnis, atau tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility)*, meskipun setiap organisasi, termasuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga amal, dan lembaga pemerintah dapat terlibat dalam akuntansi sosial.

Istilah akuntansi sosial sebenarnya bukan merupakan istilah baku dalam akuntansi. Para pakar akuntansi membuat istilah masing- masing untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan dengan lingkungannya, diantaranya dalam Sirait (2018,21):

1. D. Crowther mendefinisikan akuntansi sosial adalah "sebuah pendekatan untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi perilaku sosial yang relevan, penentuan mereka kepada siapa perusahaan bertanggung jawab untuk

kinerja sosial dan pengembangan tindakan yang tepat dan teknik pelaporan".

2. Belkoui membuat suatu terminology socio economic accounting (SEA) yang berarti "proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dengan lingkungannya".

3. Hadibroto, Bambang Sudibyo dan para pakar akuntansi di Indonesia menggunakan istilah akuntansi pertanggung jawaban sosial sebagai "akuntansi yang memerlukan laporan mengenai terlaksananya pertanggung jawaban sosial perusahaan"

4. Hendriksen menggambarkan akuntansi sosial sebagai "suatu pernyataan tujuan, serangkaian konsep sosial dan metode pengukurannya, struktur pelaporan dan komunikasi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan" pernyataan hendriksen tersebut memberikan gambaran tentang hubungan mendasar antara konsep akuntansi sosial dengan informasi yang dihasilkan, sehingga secara kongkret informasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, pada dasarnya definisi yang diberikan oleh para pakar akuntansi mengenai akuntansi sosial memiliki karakteristik yang sama, yaitu akuntansi sosial berkaitan erat dengan masalah : penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis, mengukur kegiatan tersebut, melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sistem informasi internal

dan eksternal atas penilaian terhadap sumber-sumber daya perusahaan dan dampaknya secara sosial ekonomi.Terdapat beberapa tujuan dari akuntansi sosial yaitu :

a. Memberikan informasi yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakan dapat di evaluasi
b. Membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara langsung mempengaruhi relatifitas sumber daya dan status individu, masyarakat dan segmen-segmen sosial.
c. Memberikan dengan cara yang optimal kepada semua kelompok sosial mengenai tujuan, kebijakan, program, strategi, dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan.

2.1.4 *Corporate Social Responsibility* dalam Akuntansi

Paradigma CSR memang telah mendunia saat ini. Dimana esensi luhur dalam CSR yaitu memberikan yang terbaik terhadap lingkungan sekitar, bahkan dunia dalam koridor yang luas. Pada korporasi yang telah menerapkan akuntansi sosial, laporan CSR merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dalam komponen laporan keuangan. dimana di Indonesia komponen laporan keuangan lengkap berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009) terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, laporan posisi keuangan awal periode dan catatan atas laporan keuangan. Laporan CSR terpisah dari komponen laporan keuangan pemisahan inibertujuan untuk menekankan bahwa tanggung jawab sosial harus benar- benar terpisah dari unsur *profit oriented* dimana kelima komponen laporan keuangan

diatas memiliki tujuan yang mengarah pada hasil kinerja yang dinilai berdasarkan peningkatan laba. CSR sendiri lebih dianggap sebagai investasi korporasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan perusahaan sebagai pedoman dalam penyajian akuntansi sosial yaitu perluasan laporan keuangan (*Extention of financial statment*) dalam Sirait (2018,24):

1. Pengungkapan secara naratif (*narative disclosure*). Pengungkapan secara naratif ini umumnya bersifat kualitatif dengan cara: pelaporan secara kualitatif dalam *letter to shareholder*, pelaporan secara kualitatif dalam catatan atas laporan keuangan *(notes to financial statment)*, pelaporan secara kuantitatif dalam catatan atas laporankeuangan.

2. Perkiraan tambahan (*additional account*). Dampak kerusakan lingkungan karena aktivitas perusahaan dapat diungkapkan melalui perkiraan tambahan dalam laporankeuangan.

2.1.5 Pengertian Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan *stakeholder,* yang melampaui tanggungjawab sosial di bidang hukum.

Menurut Fahmi (2015,81) Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan atau dunia bisnis adalah konstribusi dalam pengembangan ekonomi

yang berkelanjutan. Sedangkan Sirait (2018,25) Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*). CSR tersebut dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri.

Terdapat berbagai definisi CSR dari berbagai ahli, lembaga-lembaga internasional, serta berbagai pengertian yang terdapat dalam buku-buku mengenai CSR adalah sebagai berikutdalam Sirait (2018,25)

1. *European Union* mendefinisikan CSR adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.
2. Mallen Baker mengartikan CSR sebagai suatu hal bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengelolaan terhadapproses ekonominya dalam rangka menghasilkan suatu dampak positif secara menyeluruh bagi masyarakat
3. *The world Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang merumuskan CSR sebagai " *The continuing commitment by business to behave ethically And contribute to economic development*

while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life"

4. *World bank* (Bank Dunia) mengemukakan definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu persetujuan atau komitmen perusahaan agar bermanfaat bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, bekerja dengan para perwakilan dan perwakilan mereka, masyarakat setempat dan masyarakat dalam ukuran lebih luas, untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan demikian eksistensi perusahaan tersebut akan baik bagi perusahaan itu sendiri dan baik pula bagi pembangunan
5. Michael Hopkins mendefinisikan CSR adalah berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap stakeholders baik yang berada di dalam maupun diluar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab
6. Dengan memperlakukan *stakeholders* dengan cara yang bisa diterimanya.

Dari berbagai rumusan di atas, terlihat bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR. Begitu pula halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari dalam Sirait (2018,27)

1. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) yang menegaskan bahwa " tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa " tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya"

Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR antara UUPM dan UUPT, namun secara substansial kedua undang-undang ini telah merubah persepsi atau paradigm CSR dari kegiatan Voluntary menjadi Mandatory.

2.1.6 Sejarah Corporate Social Responsibility

Sejarah lahirnya CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul Social *Responsibilities of The Businessman*. Buku terlaris di era 1950- 1960-an ini menggagas prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga Bowen dinobatkan sebagai Bapak

CSR. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai "kewajiban perusahaan menjalankan usahanya, sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi".Sejak saat itu banyak refrensi ilmiah lain yang diterbitkan di berbagai negara yang mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang telah dijabarkan oleh Bowen.

Isu tentang *Corporate Social Responsibilty* (CSR) secara formal mulai muncul pada dekade 1950-an. Kemunculan Isu *Corporate Social Responsibilty* (CSR) lebih tepatnya konsep tanggung jawab social dalam dunia usaha pertama kali dipublikasikan oleh Howard R. Bowen dalam bukunya yang berjudul *Social Responsibilities of the Businessman* (1953).

Perluasan Konsep *Corporate Social Responsibilty* (CSR) (1960-AN).

Dalam dekade 1960-an pemikiran Bomen terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep Iron *Law of Social Responsibility*. Keith mengungkapkan bahwa penekanan tanggung jawab social perusahaan memiliki koneksi positif dengan ukuran atau besarnya perusahaan. Studi ilmiah yang dilakukan Keith menemukan bahwa semakin tinggi dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, maka semakin tinggi pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakat. Dalam periode 1970 - 1980, definisi *Corporate Social Responsibilty* (CSR) lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya telah merilis bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksisten si perusahaan.

Proses Pengukuhan dan Pelembagaan *Corporate Social Responsibilty* (CSR) (1990-Sekarang).Selanjutnya pada tahun 1990-an, cara-cara pandang pun berubah dimana *Corporate Social Responsibilty* (CSR) suatu perusahaan tidak hanya diarahkan untuk turut mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan, tapi persero anter sebut juga harus menyokong kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan keahlian dalam bidang pemasaran (*marketing expertise*), bantuan teksin perseroan (*technical assistance*), dan suka relawan dari kalangan pegawai. Adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan maka akan berdampak baik pula bagi perusahaan tersebut.

Memahami konsep *Corporate Social Responsibilty* (CSR) tidak bisa di pisahkan dari sejarah perkembangannya. Oleh karenanya, meskipun serba ringkas, pemaparan tentang sejarah perkembangan *Corporate Social Responsibilty* (CSR) menjadi penting sebagai bekal pengetahuan untuk memahami *Corporate Social Responsibilty* (CSR). Namun demikian, tinjauan sejarah tentang *Corporate Social Responsibilty* (CSR) tidaklah menelusuri lebih jauh hingga ke akar-akarnya ketika esensi-esensi gagasan tentang *Corporate Social Responsibilty* (CSR) itu muncul untuk pertama kalinya. Tinjauan semacam itu kiranya memerlukan pembahasan tersendiri, yakni sebagai suatu penulisan tentang sejarah gagasan. Dalam tinjauan singkat ini, pemaparan historis ini memancangkan batas awalnya pada masa ketika istilah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) secara formal muncul dalam dunia usaha untuk pertama kalinya. Adapun batas akhirnya adalah masa terkini ketika tulisan ini disusun.

Ada empat hal yang perlu diperhatikan mengenai definisi dan asumsi *Corporate Social Responsibilty* (CSR) pada periode ini. Pertama, Bowen menulis

buku tersebut pada saat dunia usaha belum mengenal sosok korporasi seperti yang kita kenal sekarang. Oleh karena dunia usaha belum mengenal dunia mutakhir, maka istilah yang sering digunakan adalah tanggung jawab social *(social responsibility of busisenessman-SroB), public Responsibility, social obligations, dan business morality*, bukannya *Corporate Social Responsibilty* (CSR). Istilah SRoB ini mengacu pada diri pengusaha yang bertanggung jawab secara social dengan bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka dapat di katakana bahwa pelaku bisnis dalam mengambil kebijakan, membuat keputusan dan bertindak diharapkan dapat menyesuaikan dengan tujuan dan nilai social yang dianut dalam masyarakat .Apabila perusahaan dalam menjalan bisnisnya sesuai dengan tujuan dan nilai social, maka kehadiran perusahaan sebagai pihak berasal dari luar masyarakat setempatakan mudah menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Kehadiran perusahaan ditengah kehidupan masyarakat bukanlah semata-mata karena kekuatan dan upaya perusahaan sendiri, melainkan karena dukungan berbagai pihak terutama masyarakat setempat yang merasakan dampak operasi bisnis. Perusahaan jenis apa pun dan milik siapapun tidak akan pernah ada jika keberadaannya tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, segala aktivitas bisnis dan bentuk tanggung jawab sosialnya harus di sesuaikan dengan nilai yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Keberadaan perusahaan hendaknya melestarikan nilai yang telah dibangun masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan yang mengabaikan nilai

dimana mereka beroperasi, maka perusahaan tersebutakan mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar.

Ketenaran istilah *Corporate Social Responsibilty* (CSR) semakin menjadi ketika buku Cannibals With Forks *: The Triple Bottom Line in* 21st *Century Business* (1998) terbit dipasaran. Buku ini adalah karangan John Elkington. Di dalam buku ini ia mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas*the World Comission on Environment and Development* (WCED). Dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas *Corporate Social Responsibilty* (CSR) ke dalam tigafokus yang sengaja ia singkat menjadi 3P yaitu singkatan dari *profit, planet* dan *people*.

Di dalam bukunya itu ia menjelaskan bahwa perusahaan yang baik tidakhanya memburu keuntungan ekonomi belaka *(profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraa nmasyarakat (*people).*

Di wilayah Asia, konsep *Corporate Social Responsibilty* (CSR), berkembang sejak tahun 1998, tetapi pada waktu tersebut belum terdapat suatu pengertian maupun pemahaman yang baik tentang konsep *Corporate Social Responsibilty* (CSR),.

Jauh sebelum UUPT mewajibkan *Corporate Social Responsibility (CSR),*perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah melaksanakan *Corporate Social Responsibilty* (CSR). Hanya saja pelaksanaannya lebih merupakan tuntutan dalam menjalankan bisnis dari pada kewajiban hukum yang dipaksakan. Meskipun setiap

negara (termasuk Indonesia) sudah mengatur agar tercipta hubungan yang serasi antara kebutuhan pokok manusia untuk memperoleh kesempatan kerja dengan upah yang layak, selalu terbentur pada keadaan yang sebaliknya. Akhirnya undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kesempatan kerja dan kebutuhan akan tenaga kerja serta tersedianya tenaga kerja semakin "kurang bermanfaat". Mengingat falsafah negara dan bangsa Indonesia adalah atas dasar Pancasila, tentu saja setiap kegiatan yang akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besaranggota masyarakat haruslah di dasarkan atas adanya Asas keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan Yang terkait. Di Indonesia istilah CSR (*Corporate Social Responsibillity)* di kenal pada tahun 1980-an.

Namun semakin popular digunakan sejak tahun 1990-an. Sama seperti sejarah munculnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dunia dimana istilah *Corporate Social Responsibilty* (CSR) muncul ketika kegiatan *Corporate Social Responsibilty* (CSR) sebenarnya telah terjadi.

Di Indonesia, kegiatan CSR ini sebenarnya sudah dilakukan perusahaan bertahun-tahun lamanya. Namun pada saat itu kegiatan *Corporate Social Responsibilty* (CSR) Indonesia dikenal dengan nama CSA (*Corporate Social Activity*) atau "aktivitas social perusahaan". Kegiatan CSA (*Corporate Social Activity*) ini dapat di katakana sama dengan *Corporate Social Responsibilty* (CSR), karena konsep dan pola piker yang digunakan hamper sama. Layaknya *Corporate Social Responsibilty* (CSR), CSA (*Corporate Social Activity*) ini juga berusaha merepresentasikan bentuk "peran serta" dan "kepedulian" perusahaan

terhadap aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, bantuan bencana alam, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), beasiswa, dll. Melalui konsep investasi social perusahaan "*seat belt*", yang di bangun pada tahun 2000-an. Sejaktahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep *Corporate Social Responsibilty* (CSR), dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini Departemen Sosial merupakan pelaku awal kegiatan *Corporate Social Responsibilty* (CSR), di Indonesia. Selang beberapa waktu setelah itu, pemerintah mengimbau kepada Pemilik perusahaan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Namun, ini hanya sebatas imbauan karena belum ada peraturan yang mengikat. Sejatinya pemerintah menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan perusahaan bukan hanya sebatas *stakeholders* atau para pemegang saham. Melainkan *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lingkungan, media massa dan pemerintah. Setelah tahun 2007 tepatnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas keluar, hamper semua perusahaan Indonesia telah melakukan program *Corporate Social Responsibilty* (CSR), meski kegiatan itu masih berlangsung pada tahap cari popularitas dan keterikatan peraturan pemerintah. Misalnya, masih banyak perusahaan yang jika memberikan bantuan maka sang penerima bantuan harus menempel poster perusahaan ditempatnya sebagai tanda bahwa ia telah menerima bantuan dari perusahaan tersebut. Jika sebuah perusahaan membantu

masyarakat secara ikhlas maka penempelan poster-poster itu terasa berlebihan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/*CSR) yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sekarang sudah banyak perusahaan yang menerapkan program-program *Corporate Social Responsibilty* (CSR), Mulai dari perusahaan yang terpaksa menjalankan program tanggung jawab sosialnya karena peraturan yang ada, sampai kepada perusahaan yang benar-benar serius dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibilty* (CSR), dengan mendirikan yayasan khusus untuk melaksanakan program-program *Corporate Social Responsibilty* (CSR) mereka.

2.1.7 Konsep – Konsep *Corporate Social Responsibility*

Menurut Archie B. Carrol secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan didasari tiga prinsip dasar yang dikenal sebagai *triple bottom lines* yaitu 3P:

a. *Profit*. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang
b. *People*. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan terhadap manusia, beberapa perusahaan

mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

c. *Planet*. Perusahaan peduli terhadap lingkungn hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, dan pengembagan Pariwisata (ekoturisme).

Konsep piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis.

2.1.8 Dasar Hukum Corporate Social Responsibility

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT) UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

a. Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.

b. Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

c. Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungj awab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.1.9 Prinsip-prinsip CSR atau (*Corporate Social Responsibility)*

Sebagai acuan dalam menerapkan CSR dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh seorang pakar CSR dari *University of Bath Inggris* yaitu Alyson Warhurst. Dimana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa terdapat 16 prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu :

a. Prioritas Perusahaan. Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penetu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.

b. Manajemen terpadu. Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.

c. Proses Perbaikan. Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus

dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.

d. Pendidikan Karyawan. Karyawan sebagai stakeholders Primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.

e. Pengkajian. Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai

f. suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.

g. Produk dan Jasa. Suatu perusahaan harus senantiasa mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak berdampak negatif secara sosial.

h. Informasi Publik. Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atas suatu produk/ jasa.

i. Fasilitas dan Operasi. Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.

j. Penelitian. Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah

yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.

k. Prinsip Pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang dan jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

l. Kontraktor dan Pemasok. Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.

m. Siaga Menghadapi Darurat. Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal.

n. Transfer *Best Practice*. Berkontribusi pada perkembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor public.

o. Memberikan Sumbangan. Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

p. Keterbukaan (*disclosure)*. Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap resiko potensial yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.

q. Pencapaian dan Pelaporan. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.

2.1.10 Manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek semata namun harus mengejar keuntungan jangka panjang dimana berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan harus mampu menyelaraskan kinerja ekonomi (*profit*), kinerja sosial (*people*), dan kinerja lingkungan (*planet)* yang dikenal dengan istilah triple bottom line, yang akan membuat perusahaan mampu memperoleh keuntungan dengan melaksanakan program CSR secara tulus dan konsisten.

*Corporate Social Responsibility (*CSR) memiliki banyak manfaat bagi perusahaan meskipun perusahaan harus mengeluarkan sebagian keuntungan yang didapatnya. Adapun manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan menurut Fahmi (2015,83) adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citraperusahaan .
2. Mendapatkan lisesnsi untuk beroprasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi oprasional usaha.
5. Membuka peluang pasar lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders.*
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan

2.1.11 Model Tanggung Jawab *Corporate Social Responsibility*

Implementasi CSR menurut Abdurrahman (2015,465) mencakup hal-hal berikut :

1. Bantuan sosial Meliputi bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengetasan kemiskinan, dan pembinaan masyarakat.
2. Pendidikan dan pengembangan Meliputi pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan, dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah.

3. Ekonomi Meliputi mengadakn program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar.
4. Lingkungan Meliputi pengelolaan lingkungan, penangan limbah, dan melestarikan alam dan keragaman hayati.
5. Konsumen Melakukan perbaiikan produk secara berkesinambungan, layanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk

2.1.12 Permasalahan *Corporate Social Respnsibility*

Corporate Social Responsibility masih memiliki beberapa permasalahan yaitu :

a. Masih belum seragam dan jelas batasan tanggung jawab sosial
b. Sikap oportunis perusahaan terlebih social responsibility mengandung biaya yang cukup besar yang belum tentu memiliki relevansi terhadap pencapaian tujuan yang bersifat economic motive.
c. Kurang respon *stakeholder (silent stakeholder*) sehingga kurang menciptakan social control meskipun masyarakat merupakan sosial agen.
d. Dukungan tata perundangan yang masih lemah
e. Standar operasional yang masih kurang jelas
f. Belum jelasnya ukuran evaluasi.

Konteks seperti itu relatif menciptakan praktik CSR sebatas seadanya saja dan bersifat formalitas, meskipun terdapat beberapa perusahaan memiliki

komitmen dan serius dalam menjalankan strategi CSR.

2.1.13 Implementasi *Corporate Social Responsibility*

1. Pola Implementasi *Corporate SocialResponsibility*

Dalam upaya mencapai efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sedikitnya ada empat model atau pola yang secara umum dilaksanakan di Indonesia menurut Edi suharto dalam Sirait (2018,34):

a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dnegan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan

c. Bermitra dengan pihak lain. Pihak perusahaan melakukan kerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaannya.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu consortium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau medukung suatu lembaga

sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki efektivitas yang tinggi hanya dapat dicapai jika pelaku usaha tidak lagi berperan hanya sebagai dermawan. Sikap seperti ini berdampak negatif, yaitu melestarikan ketergantungan pada uang kontribusi. Dalam konteks pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, semestinya dapat dibangun suatu relasi dalam bentuk mitra kerja antara perusahaan dengan masyarakat setempat dalam upaya mencapai tujuan bersama.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi CSR

Menurut Prince of Wales Foundation dalam Sirait (2018,36) ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi Implementasi CSR, Pertama , menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. Kedua, *Environments* yang berbicara tentang lingkungan. Ketiga adalah *Good Corporate Governance.* Keempat, *social Cohesion* artinya dalam melaksanakan CSR jangan menimbulkan kecemburuan sosial. Kelima, *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

2.1.14 Perlakuan Akuntansi

Menurut Priantinah dalam Dewiyana (2015,38) Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial akan berakibat buruk bagi lingkungan. Akuntansi selaku bagian integral dalam dunia bisnis dapat menjadi alat untuk mencegah penggunaan sumber daya alam yang tidak semestinya, dengan

membuat laporan keuangan yang memperlihatkan apa yang dilakukan oleh perusahaan atas sumber daya. Akuntansi sebagai proses penghasil informasi keuangan harus mampu mengukur upaya perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab sosialnya, melalui akuntansi sosial dan CSR, perlakuan akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*meansurement)* dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*) . Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi:

1. Pengukuran Penilaian
   Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penuntuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.
2. Pengakuan
   Merupakan proses pembentukkan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan.
3. Pengungkapan
   Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas dapat dirumuskan bahwa perlakuan akuntansi adalah suatu tindakan yang dilakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya

sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakaiannya.

2.1.15 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi sebuah perusahaan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut PSAK No.1 (2017:1.3) ‘’Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas’’. Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli, antara lain:

Menurut Hans Kartikahadi,dkk (2016:12) ‘’Laporan Keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintah dan manajemen.

Menurut Van Horne & John M, Wachowicz, JR (2016:154), menyatakan bahwa ‘’laporan keuangan adalah seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan’’.

1.2. Kerangka Pikir

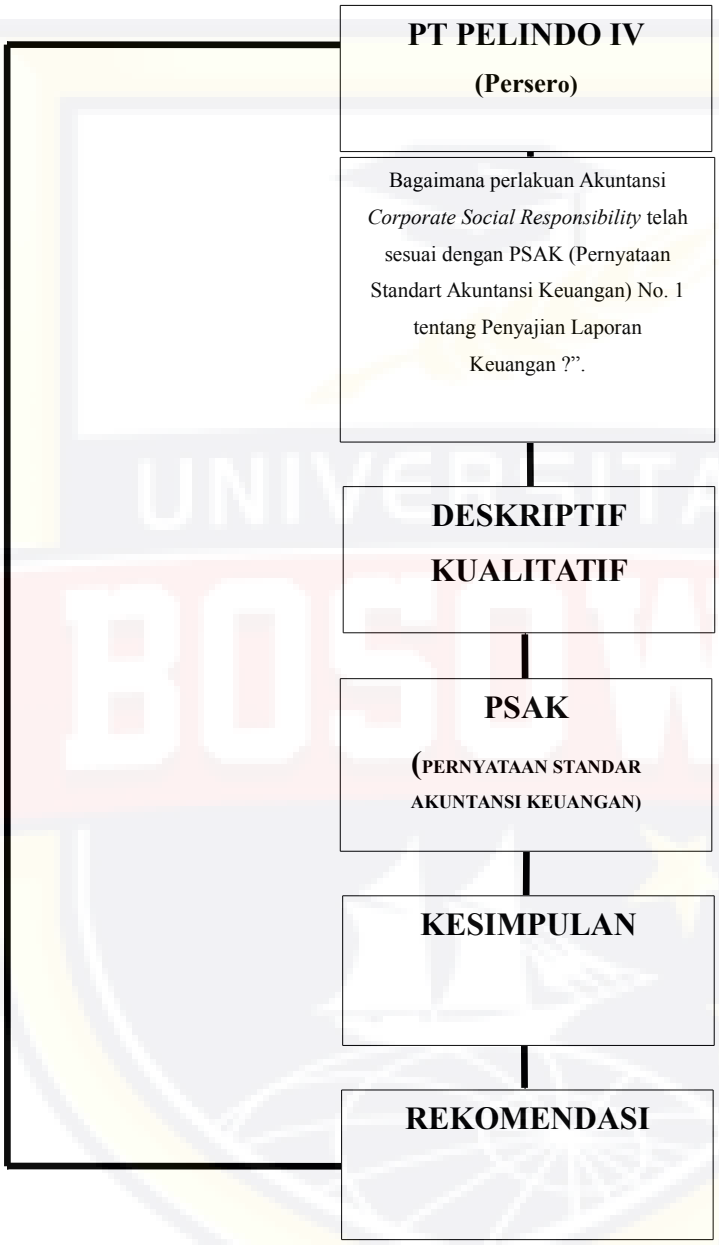

GAMBAR 2.1 KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) yang berlokasi di Jalan. Soekarno No. 1 Makassar, Sulawesi Selatan , 90173 Indonesia. Oleh karena itu PT Pelabuhan Indonesia IV dianggap layak untuk di jadikan objek penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data ini adalah penelitian kualitatif dimana penulis menganalisis perlakuan akuntansi terhadap pelaporan pertanggung jawaban sosial di salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara).Penelitian Kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretative yang bersumber dari kepercayaan. Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan focus penelitian, dimana penulis mengharapkan untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam tentang perlakuan akuntansi terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mangacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkapkan pembuktian kebenaran dalam masalah yang di angkat sesuai

dengan judul penenlitian ini yakni Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Pelabuhan Indonesia IV (persero).

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder di dapatkan melalui studi pustaka yang relevan dengan tujuan penelitian dan laporan tahunan untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 yang dibuat oleh perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Kegiatan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

   Penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang dilakukan di lokasi secara langsung maupun di tempat lain.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

   Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya dengan adanya dokumen. Alasan kenapa penelitian kepustakaan berguna bagi penelitian kualitatif karena merupakan sumber yang stabil dan berguna sebagai bukti untuk suatu

pengujian, karena sifatnya yang alamiah, jelas, dan tidak sulit ditemukan.

3.4 Metode Analisis

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang artinya mendeskripsikan temuan dari data-data yang diperoleh dan akan dianalisis tentang Analisis perilaku akuntansi terhadap Program laporan aktivitas CSR (*Corporate Social Responsibility)* yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).

Kemudian peneliti akan melakukan data yang telah di peroleh akan di olah, selanjutnya data yang telah diolah akan di analisis agar dapat memberikan alternatif pemecahan permasalahan bagi perusahaan dan pada akhirnya akan di tarik kesimpulan dari pembahasan yang ada maka . Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap pembuktian kebenaran masalah dalam penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia IV atau Pelindo 4 secara efektif bekerja pada tanggal 1 Desember 1992. Namun pendirian PT Pelabuhan ini tak lepas dari sejarah Indonesia dalam pengelolaan pelabuhan laut di Indonesia.

Sebelum tahun 1983, pengelolaan pelabuhan laut dilaksanakan oleh delapan Badan Usaha berbentuk Perusahaan Negara yaitu PN Pelabuhan I - VIII. Namun sejalan dengan kebijakan tatanan pelabuhan nasional, delapan badan usaha tersebut di merjer menjadi empat Badan Usaha yang berstatus Perusahaan Umum (Perum) I -IV.

Perum Pelabuhan IV merupakan hasil merger PN Pelabuhan V, VI, VII, dan VIII, di tambah enam pelabuhan yang tidak diusahakan di Propinsi Irian Jaya. Selanjutnya, dilandasi oleh pertimbangan efisiensi dan efektivitas perusahaan, Perum Pelabuhan IV beralih bentuk menjadi Persero, yaitu PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.

PT Pelabuhan Indonesia IV berkantor pusat di Jalan Soekarno No. 1 Makassar dan sepenuhnya di kuasai oleh Pemerintah. Pada saat ini Pelindo IV telah dialihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) memiliki visi untuk menjadi perusahaan jasa kepelabuhan berstandar internasional yang mandiri, sehat, dan menjamin kesinambungan transportasi nasional.

Secara efektif keberadaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar Perusahaan oleh Sekjen Dephub berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No 7 tanggal 1 Desember 1992. Menilik perkembangan kebelakang di masa awal pengelolaannya, PT Pelabuhan

Indonesia IV (Persero) telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju.

Tahun 1957-1960

Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan pelabuhan berada di bawah koordinasi Djawatan Pelabuhan. Seiring dengan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dengan di keluarkannya PP No. 19/1960, maka status pengelolaan pelabuhan dialihkan dari Djawatan Pelabuhan berbentuk badan hukum yang disebut Perusahaan Negara. (PN)

Tahun 1960-1963

Berdasarkan PP No. 19 tahun 1960 tersebut pengelolaan pelabuhan umum diselenggarakan oleh PN pelabuhan I-VIII. Di kawasan Timur Indonesia sendiri terdapat 4 (empat) PN Pelabuhan yaitu : PN Pelabuhan Banjarmasin, PN Pelabuhan Makassar, PN Pelabuhan Bitung dan PN Pelabuhan Ambon.

Tahun 1964-1969

Pada masa order baru, pemerintah mengeluarkan PP 1/1969 dan PP 19/1969 yang melikuidasi PN Pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang di pimpin oleh Administrator Pelabuhan sebagai penanggung jawab tunggal dan umum di pelabuhan. Dengan kata lain aspek komersial tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh Lemabaga Pemerintah yang disebut *Port Authority*.

Tahun 1969- 1983

Pengelolaan Pelabuhan dalam likuiditas dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan PP 1/1969 dan PP 18/1969. Dengan adanya penetapan itu, pelabuhan dibubarkan dan Port Authority digantikan oleh BPP.

Tahun 1983-1992

Status pelabuhan dalam likuidasi yang di kenal dengan BPP berakhir dengan keluarnya PP 11/1983 dan PP 17/1983 yang menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Tahun 1992 – sekarang

Di landasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh perum pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP 59/1991 bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkanbentuknyadariPerummenjadi (Persero). Selanjutnya Perum Pelabuhan Indonesia IV beralih menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV. Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV yang berkantor pusat di jalan Soekarno No. 1 Makassar sepenuhnya di kuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada saat ini telah di alihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4.2. Visi, Misi, serta Tata Nilai dan Budaya PT Pelabuhan Indonesia IV

4.2.1. Visi

"Menjadi perusahaan pengelola pelabuhan yang terntegritas, berdata saing tinggi dan bertaraf internasional".

4.2.2. Misi

1. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.
2. Menyediakan Jasa kepelabuhan dan non-kepelabuhan (penunjang) yang terintegrasi dengan berorientasi pada kepuasan dan loyalitas pelanggan.
3. Menciptakan transformasi untuk mendorong pengembangan professional dan personal bagi kesejahteraan karyawan.
4. Meningkatkan nilai tambah bagi Stakeholder internal dan eksternal secara berkelanjutan.
5. Memaksimalkan nilai pemegang saham secara berkelanjutan (*Shareholder*).

4.2.3. Tata Nilai dan Budaya

1. **Integrity (Integritas)** adalah konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang di hasilkan. Perusahaan/orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.
2. **Synergistic (Sinergitas)** adalah kerjasama antar unsur atau bagian atau fungsi yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada di kerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama

berbagai unsure atau bagian atau kelompok atau fungsi untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

3. **Professional (Profesional)** adalah orang yang memiliki kemampuan (keahlian) yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang berkaitan dengan pekerjaan dan perbuatannya.
4. **Innovative (Inovatif)** adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan karya baru." "Berpikir inovatif yaitu proses berpikir yang menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif (*out of the box*)".
5. **Satisfied Customer (Kepuasan Pelanggan)** adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk/jasa yang dibeli/digunakan. Secara umum, kepuasan pelanggan dapat dikatakan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang dari perbandingan antara produk/jasa yang dibeli atau digunakan sesuai atau tidak dengan harapannya.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Tugasnya

PELINDO 4

Lampiran Ia : Peraturan Direksi
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor : PD 10 Tahun 2019
Tanggal : 12 April 2019

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT

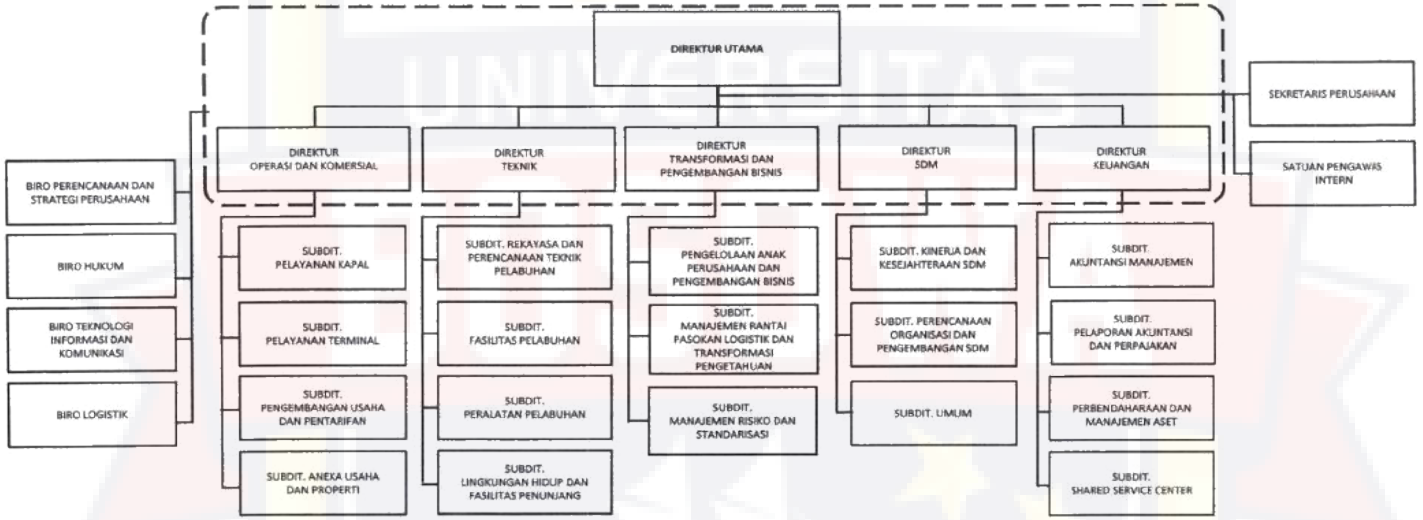

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

PELINDO4
DIREKSI
PT PELABUHAN INDONESIA IV

FARID PADANG

- 25a-

A2	A3	A4	A5	A6

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI

1. Uraianan Tugas dan Tanggung Jawab

a. Direktorat Operasi dan Komersial

Direktorat Operasi dan Komersial mempunyai fungsi perencanaan, pelaksaaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi program operasional serta pemasarannya, pengembangan usaha, dan manajemen mutu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

1) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur kegiatan pelayanan jasa kapal dan jasa Maritim (Marine and Maritime Services).
2) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur kegiatan pelayanan petikemas, terminal konvensional dan pelayanan barang (Logistic Services)
3) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur kegiatan pelayanan terminal penumpang, pemanfaatan property serta jasa kepelabuhanan lainnya (Other Services)
4) Membuat rencana pengembangan usaha perusahaan dan memonitor program kerjasama usaha
5) Merumuskan kebijakan, program, riset pasar dan menganalisis potensi pasar, peta persaingan, dan pelanggan potensial
6) Melakukan riset pasar dan menganalisis potensi pasar, peta persaingan, dan pelanggan potensial serta melakukan evaluasi dan penyusunan tarif pelayanan jasa ke pelabuhanan

7) Mengembangkan kebijakan dan mengawasi standar dan kualitas mutu serta pelayanan.

b. Direktorat Fasilitas dan Peralatan

Direkorat Fasilitas dan Peralatan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi program pengembangan fasilitas dan Peralatan pelabuhan, pemeliharaan bangunan dan peralatan pelabuhan, fasilitas penunjang serta lingkungan hidup pelabuhan (*port environment)* sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

1) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur kegiatan pengembangan dan rekayasa fasilitas dan peralatan, pemeliharaan bangunan dan peralatan pelabuhan, lingkungan pelabuhan (port environment) serta fasilitas penunjang lainnya.
2) Merancang, merencanakan dan mengawasi kegiatan pengembangan dan rekayasa fasilitas dan peralatan pelabuhan.
3) Merencanakan,mengawasi,dan mengevaluasi program pemeliharaan bangunan di atas air dan di darat, termasuk kolam pelabuhan.
4) Merencanakan,mengawasi,dan mengevaluasi program pemeliharaan peralatan bongkar muat, alat apung, instalasi listrik dan air
5) Merencanakan,mengawasi,dan mengevaluasi program pemeliharaan dan pengendalian lingkungan pelabuhan (*port environment*) serta fasilitas penunjang lainnya.

c. Direktorat SDM dan Umum

Direktorat Personalia dan Umum mempunyai fungsi perencanaan, pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia, serta kerumah tanggaan dan Umum , ketata usahaan Perseroan, sesuai kebijakan yang telah di tetapkan.

Tugas-tugas :

1) Merencanakan, membina dan mengembangkan Sumber Daya Manusia serta melakukan kajian dan analisis serta mengambil langkah-langkah perbaikan guna pengembangan dan pembenahan organisasi.
2) Menyusun dan mengevaluasi Masterplan Sumber Daya Manusia sesuai perkembangan bisnis perusahaan.
3) Menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi Pengembangan Karir Pegawai dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai (KPI Individu).
4) Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Administrasi Kepegawaian dan menerapkan system informasi manajemen Sumber Daya Manusia.
5) Menyusun dan Mengevaluasi kebijakan terkait Pembinaan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan pegawai serta menyelenggarakan dan mengevaluasi survey kepuasan pegawai.
6) Membina, menyusun kebijakan dan kerumahtanggaan serta ke protokoleran.

7) Membina, menyusun kebijakan dan menyelenggarakan sistem pengamanan dan pemeliharaan fasilitas fisik, dokumen serta inventaris perusahaan.

d. Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan Perseroan meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perbendaharaan dan manajemen asset serta pembinaan dan evaluasi bagi anak perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telahditetapkan.

Tugas-tugas :

1) Membina dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran secara terpadu dengan Direktorat terkait serta mengendalikan pelaksanaan anggaran tahunan Perseroan.
2) Membina dan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen,dan akuntansi biaya.
3) Membina, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan hutang piutang, manajemen arus kas, dan perbendaharaan Perseroan.
4) Merencanakan,mengelola dan mengevaluasi penyediaan pendanaan/pembiayaan pengembangan usaha dan investasi dengan skema *financing* yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan.
5) Merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pemetaan dan pengelolaan aset menuju kondisi *clean and clearance.*

6) Membina dan melaksanakan transaksi keuangan dan melaksanakan verifikasi transaksi keuangan Perseroan.
7) Membina dan melaksanakan program perpajakan, perencanaan pajak (*tax planning*), menyusun laporan keuangan versifiskal, pengendalian kewajiban perpajakan Perseroan serta verifikasi laporan keuangan cabang Perseroan.
8) Membina dan mengevaluasi kegiatan usaha dan keuangan pada anak perusahaan.

e. Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan jasa konsultansi melalui audit terhadap semua unit kerja untuk mengadakan penilaian atas sistem pengendalian dan pengelolaan manajemen serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Tugas-tugas :

1) Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas Perseroan baik melalui pengamatan maupun audit (pemeriksaan) terhadap pengelolaan keuangan, operasi dan teknik, SDM dan umum, serta Komersial dan Pengembangan Usaha pada seluruh unit kerja Perseroan.
2) Melakukan review terhadap hasil pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dan pelaksanaan audit internal serta memberikan jasa konsultansi dan rekomendasi.
3) Pengawasan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian,

akuntabilitas pertanggung jawaban dan kewajaran di lingkungan Perseroan.

4) Memberikan dukungan dan masukan untuk audit system manajemen mutu, HSE, dan risiko.

f. Biro Pengelolaan Strategis Perusahaan

Biro Pengelolaan Strategis Perusahaan mempunyai fungsi perencanaan, penyelarasan dan Pengelolaan Strategis Perusahaan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan manajemen kinerja perusahaan, cabang dan unit usaha lainnya serta pengelolaan portofolio bisnis perusahaan.

Tugas-tugas :

1) Mengkoordinir, mengarahkan dan menetapkan perencanaan strategi perusahaan untuk diajukan kepada dan disetujui oleh Direksi.
2) Mengkoordinir, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pelabuhan untuk menunjang perencanaan dan pengembangan usaha serta pencapaian target perusahaan dalam jangka panjang.
3) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pemetaan profilrisiko, pelaksanaan analisis risiko dan pengembangan system manajemen risiko.
4) Menetapkan, mengarahkan dan mengukur *Key Performance Indicators* Perusahaan, Direktorat, Unit Kerja, Cabang dan unit usaha lainnya serta mengkoordinasikan penerapan manajemen kinerja.

5) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan laporan pemetaan bisnis, strategi serta evaluasi portofolio bisnis perusahaan, baik cabang-cabang maupun seluruh unit usaha lainnya.

g. Sekretariat Perusahan

Sekretariat Perusahaan mempunyai fungsi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan evaluasi kegiatan komunikasi perusahaan, kehumasan, hubungan antar lembaga dan luar negeri, kesekretariatan Direksi, Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan.

Tugas-tugas :

1) Mengelola kesekretariatan Direksi, rapat Direksi, rapat Komisaris, RUPS, dan kegiatan administrasi Direksi lainnya.
2) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi perusahaan, termasuk komunikasi eksternal, komunikasi internal, dan kehumasan.
3) Melaksanakan kegiatan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dari perusahaan.
4) Pengawasan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggung jawaban dan kewajaran di lingkungan Perseroan. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi program kemitraan dan bina lingkungan.

h. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai fungsi penyiapan, pembinaan dan penyelenggaraan aspek hukum yang meliputi peraturan dan perikatan perusahaan serta penelaahan dan penanganan masalah hukum.

Tugas-tugas :

1) Merumuskan dan menyiapkan rancangan peraturan dan dokumen Perseroan.
2) Menyiapkan rancangan perikatan Perseroan dengan pihak lain.
3) Menelaah produk hukum yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.
4) Menangani aspek hokum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan.

i. Biro Teknologi Informasi

Biro Teknologi Informasi mempunyai fungsi pengelolaan pengembangan dan pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai kebijakan yang telah ditetapkan

Tugas-tugas :

1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang dinilai penting bagi keberhasilan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perusahaan.

2) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi Pengembangan sistem dan Aplikasi yang sesuai untuk keberhasilan layanan Teknologi Informasi perusahaan.+
3) Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta menyediakan pelayanan internal dan eksternal dengan didukung oleh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

j. Biro Logistik

Biro Logistik mempunyai fungsi menyiapkan pembinaan dan pengembangan sistem logistik perusahaan, menyusun program kerja serta menyelenggarakan kegiatan logistik perusahaan, yang meliputipengadaan, perbekalan, pendistribusian, dan pengendalian, pengadaan bidang teknik dan non teknik, serta pengolahan administrasi pengadaan barang dan jasa.

Tugas-tugas :

1) Menyusun rencana proses pengadaan yang akan dilakukan oleh perusahaan, baik di kantor pusat maupun di cabang, sehingga dapat dikoordinasikan dengan baik dan sesuai target waktu yang diinginkan. Mengelola kebutuhan layanan administrasi dari semua proses pengadaan, termasuk dalam menyiapkan dokumen pengadaan.
2) Mengelola pelaksanaan seluruh tahapan proses pengadaan baik pengadaan fisik, pengadaan non fisik, maupun pengadaan lainnya, untuk setiap jenis pengadaan di perusahaan, termasuk koordinasi pengadaan di cabang.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Tujuan

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong terciptanya kedamaian dan keharmonian dalam kehidupan masyarakat sekitar serta bertanggungjawab dalam menjaga lingkungan sebagaimana sesuai dengan Visi dan Misi yang ada.

Salah satu objek yang terpenting dalam memperoleh dampak positif seiring dengan perkembangan bisnis yang telah jalan saat ini adalah masyarakat. Yang dimana PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ini telah berinisiatif mengalokasikan sebagaimana keuntungan perusahaan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekitar di bidang Ekonomi dan Sosial.

4.2.2. Sasaran

PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar menerapkan sasaran startegis perseroan dalam tanggung jawab pengembangan sosial dan kemasyarakat yaitu melibatkan masyarakat maupun *stakeholders* terkait lain di area kerja sebagai bagian dalam kegiatan operasional, berpartisipasi aktif dalam kepedulian sosial dengan menerapkan pemberdayaan komunitas.

4.2.3. Perlakuan Akuntansi Aktivitas CSR PT Pelabuhan Indonesia IV

Berdasarkan hasil penelitian,untuk kegiatan PKBL, perlakuan akuntansinya adalah diakui sebagai beban periodik perusahaan. Dimana pengukuran untuk biaya PKBL sesuai dengan Peraturan Menteri Per-05/MBU/2007 yang mengharuskan BUMN untuk menyisihkan 2% dari labanya,

namun penyisihan dana untuk program PKBL terakhir dilakukan pada tahun 2019. Kegiatan PKBL yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) dicatat sebagai beban umum dengan nama akun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi. Indikator penilaian kegiatan PKBL yaitu efektivitas (penyaluran).

4.3. Analisis Data

Informasi terkait realisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) dapat dilihat pada laporan laba rugi perseroan. Dalam laporan tersebut terdapat akun Beban Umum yang di dalamnya terdapat akun Beban PKBL (Program Kemitraan Bina dan Lingkungan. Penyajian laporan realisasi pada PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) atas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah sesuai dengan PSAK NO.1 paragraf 09 (revisi 2015) yaitu ‘’laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu enntitas’’. Adapun realisasi dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari tahun 2017, 2018 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

REALISASI PROGRAM KEMITRAAN BINA DAN LINGKUNGAN
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2019

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019
A	PENGGUNAAN DANA			
	1) BENTUK BANTUAN			
	a. Korban Bencana Alam		300,000,000	200,000,000

	b. Pendidikan dan Pelatihan	1,590,708,000	707,944,000	1,531,979,000
	c. Bantuan Kesehatan	30,000,000	756,606,000	200,000,000
	d. Pengembangan Sarana Umum	521,500,000	351,500,000	1,963,353,000
	e. Bantuan sarana Ibadah	1,496,031,000	1,045,000,000	672,500,000
	f. Pelestarian Alam	35,000,000	272,757,000	279,715,000
	g. Bansos dlm rangka pengent. Kemiskinan	1,697,288,000	1,931,300,000	2,117,728,000
	h. Bantuan Diklat, Promosi MB			
	2) Beban Operasional			
	3) Pengeluaran Lainnya			
	JUMLAH	5,370,527,000	5,365,107,000	6,965,275,000
B	BANTUAN KEMITRAAN			
	1) PINJAMAN	5,700,000,000.00		8,600,000,000.00
	2) HIBAH	117,885,000.00	1,140,000,000.00	2,150,000,000.00
	JUMLAH	5,817,885,000.00	1,140,000,000.00	10,750,000,000.00
	JUMLAH A+B	11,188,412,000.00	6,505,107,000.00	17,715,275,000.00

Tabel 4.2 Realisasi PKBL Sumber:Inaport4.co.id (4 sept 2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui realisasi anggaran dana program *Corporate Social Responsibilty* (CSR) PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017,2018,dan 2019.

Pada program pertama penganggaran dana dalam bentuk bantuan korban bencana alam pada tahun 2017 tidak terlaksana. Pada program kedua penganggaran dana dalam bentuk bantuan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.590.708.000 atau 30%. Pada program ketiga penganggaran dana dalam bentuk bantuan kesehatan sebesar Rp 30.000.000 atau 1%. Pada program keempat penganggaran dana dalam bentuk Pengembangan Sarana Umum sebesar Rp 521.500.000 atau 10%. Pada program kelima penganggaran dana dalam bentuk Bantuan Sarana Ibadah sebesar Rp 1.496.031.000 atau 28%. Pada program keenam penganggaran dana dalam bentuk Pelestarian Alam sebesar Rp 35.000.000 atau 1%. Pada program ketujuh penganggaran dana dalam bentuk Bantuan Sosial dalam rangka pengetasan Kemiskinan sebesar Rp 1.697.288.000 atau 32% dan jumlah bantuan Bina Lingkungan pada tahun 2017 sebesar Rp 5.370.527.000. Adapun juga bantuan Kemitraan yang dimana Pinjaman sebesar Rp 5.700.000.000 dan Hibah sebesar 117.885.000 . Jumlah keseluruhan realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2017 sebesar Rp 11.188.412.000.

Pada program pertama penganggaran dana dalam bentuk bantuan korban bencana alam pada tahun 2018 sebesar Rp 300.000.000 atau 6%. Pada program kedua penganggaran dana dalam bentuk bantuan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2018 sebesar Rp 707.944.000 atau 13%. Pada program ketiga

penganggaran dana dalam bentuk bantuan kesehatan sebesar Rp 756.606.000 atau 14%. Pada program keempat penganggaran dana dalam bentuk Pengembangan Sarana Umum sebesar Rp 351.500.000 atau 7%. Pada program kelima penganggaran dana dalam bentuk Bantuan Sarana Ibadah sebesar Rp 1.045.000.000 atau 19%. Pada program keenam penganggaran dana dalam bentuk Pelestarian Alam sebesar Rp 272.757.000 atau 5%. Pada program ketujuh penganggaran dana dalam bentuk Bantuan Sosial dalam rangka pengetasan Kemiskinan sebesar Rp 1.931.300.000 atau 36% . Adapun juga bantuan Kemitraan yang dimana Hibah sebesar Rp 1.140.000.000 . Jumlah keseluruhan realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2018 sebesar Rp 6.505.107.000.

Pada program pertama penganggaran dana dalam bentuk bantuan korban bencana alam pada tahun 2019 sebesar Rp 200.000.000 atau 3%. Pada program kedua penganggaran dana dalam bentuk bantuan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.531.979.000 atau 22%. Pada program ketiga penganggaran dana dalam bentuk bantuan kesehatan sebesar Rp 200.000.000 atau 3%. Pada program keempat penganggaran dana dalam bentuk Pengembangan Sarana Umum sebesar Rp 1.963.353.000 atau 28%. Pada program kelima penganggaran dana dalam bentuk Bantuan Sarana Ibadah sebesar Rp 672.000.000 atau 10%. Pada program keenam penganggaran dana dalam bentuk Pelestarian Alam sebesar Rp 279.715.000 atau 4%. Pada program ketujuh penganggaran dana dalam bentuk Bantuan Sosial dalam rangka pengetasan Kemiskinan sebesar Rp 2.117.728.000 atau 30%. Adapun juga bantuan Kemitraan yang dimana Pinjaman

sebesar Rp 8.600.000.000 dan Hibah sebesar Rp 2.150.000.000 . Jumlah keseluruhan realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2019 sebesar Rp 17.715.275.000.

PERSENTASE REALISASI CSR TAHUN 2017

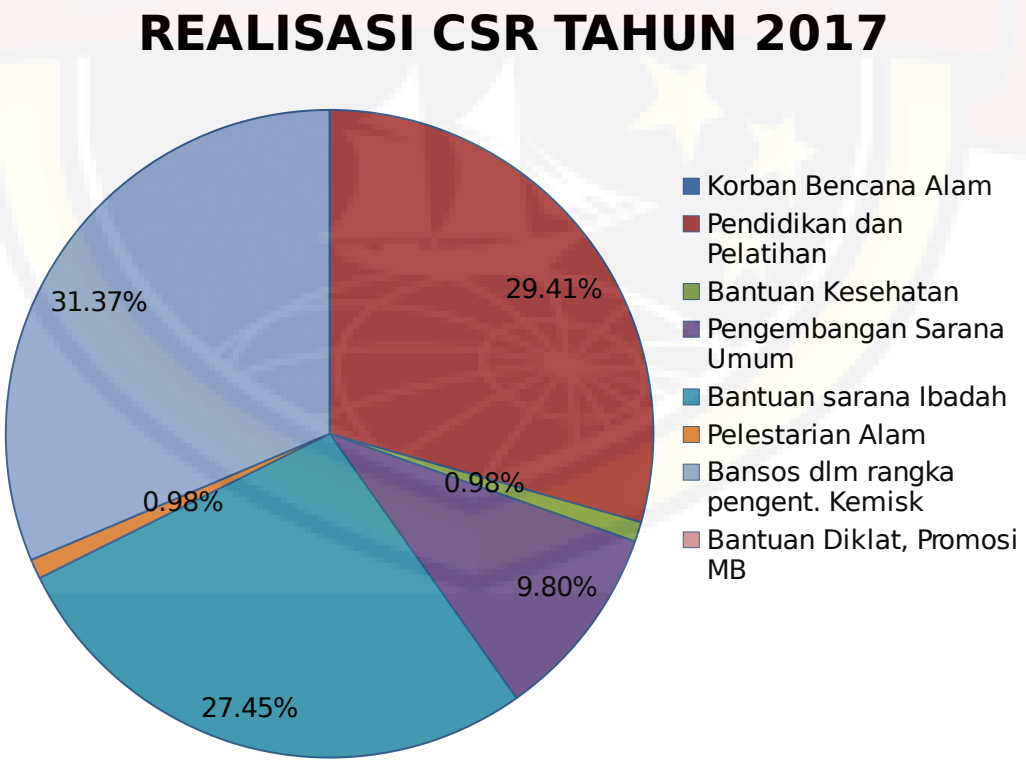

Gambar 4.3 Realisasi CSR

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui anggaran CSR PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) tahun 2017 paling banyak dialokasikan dalam bidang Bantuan sosial dalam rangka pengetasan kemiskinan sebesar 31%, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 29%, Korban Bencana Alam sebesar 28%, Pengembangan Sarana Umum sebesar 10%, Pelestarian Alam sebesar 1%,dan Korban Bencana alam dan Bantuan Diklat, promosi juga tidak ada.

PERSENTASE REALISASI TAHUN 2018

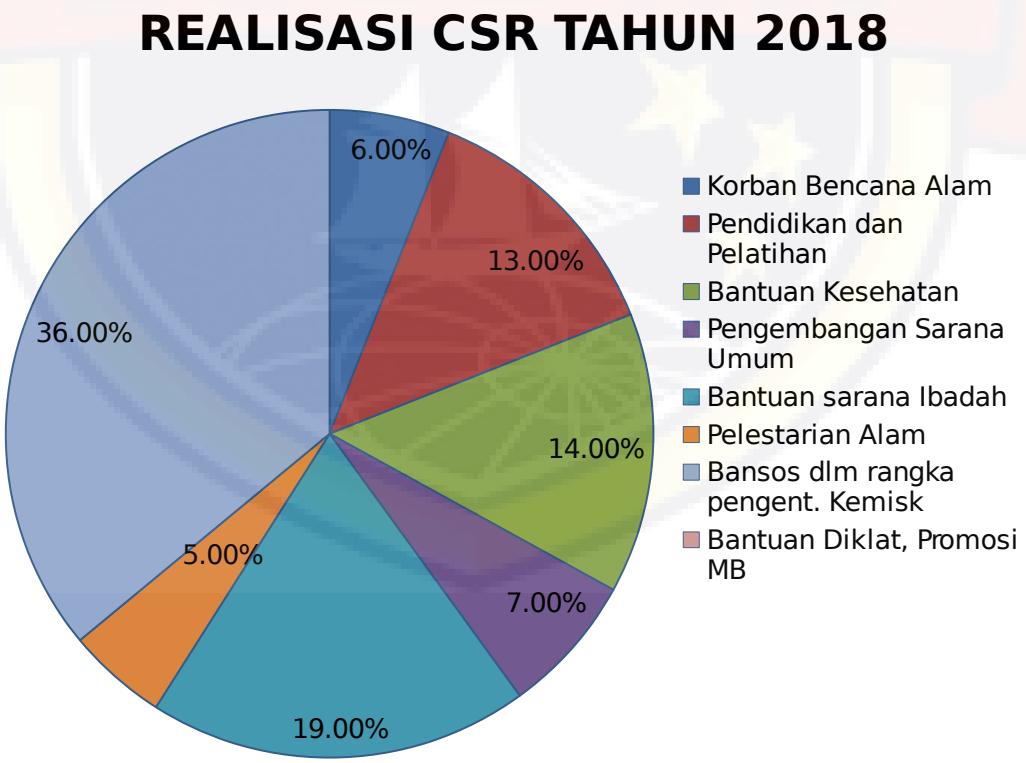

Gambar 4.4 Realisasi CSR

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui anggaran CSR PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) tahun 2018 paling banyak dialokasikan dalam bidang bansos dalam rangka pengetasan kemiskinan sebesar 36%, Bantuan Sarana Ibadah sebesar 19%,Bantuan Kesehatan sebesar 14%, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 13%, Pengembangan Sarana Umum sebesar 7%, Korban Bencana Alam sebesar 6%, Pelestarian Alam sebesar 5% serta Bantuan Diklat, Promosi MB sebesar 0%.

PERSENTASE REALISASI TAHUN 2019

UNIVERSITAS BOSOWA

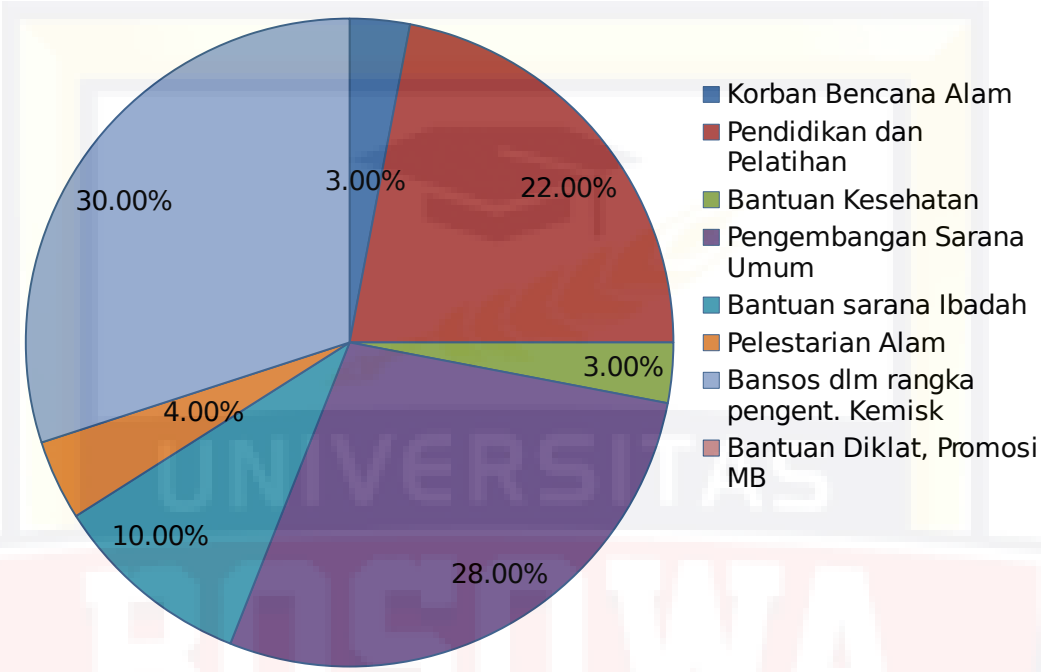

Gambar 4.5 Realisasi CSR

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui anggaran CSR PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) tahun 2019 paling banyak dialokasikan dalam bidang Bansos dalam rangka pengetasan kemiskinan sebesar 30%, Pengembangan Sarana Umum sebesar 28%, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 22%, Bantuan Sarana Ibadah sebesar 10%, Pelestarian Alam sebesar 4%, Korban bencana Alam dan Bantuan Kesehatan sebesar 3% serta Bantuan diklat,Promosi MB sebesar 0%.

DAFTAR PUSTAKA

Andreas, Lako. 2013. Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi. Jakarta. Erlangga

Budi Untung, Hendrik. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Dewiyana, Putri Ayu Tenri. 2015. Analisis Implementasi dan perlakuan akuntansi corporate social responsibility PT Pelabuhan Indonesia IV (persero). Skripsi. Makassar:Universitas Hasanuddin.

Fahmi, Irham. 2015. Manajemen Strategi Pemasaran. Bandung:Pustaka Setia

Gassing, Syarifuddin S., Suryanto, (2016). *Public Relation,* Yogyakarta: Andi

Hans Kartikahadi., dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.

Kieso, Donald.E., Jerry. Weygandt, Terry D. Warfield. 2018.*Intermediate Acccounting*. IFRS *Edition. Second Edition*. United States: WILLEY.

Mardikantro, Totok. 2014. *CSR* (*Corporate Social Responsibility)* Bandung: Alfabeta

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik Negara dengan usaha kecil dan program kemitraan bina lingkungan. 2007. BUMN.

Rusdianto, untung. 2012. CSR *Communications A Framework For Practitioners*. Yogyakarta: graha ilmu.

Sirait, Khairunnisak Afnni.2018. Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan PT. Angio Estern Plantations. Skripsi Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Van Home, James C. dan John M Wachowicz, JR. 2016. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (edisi 13). Jakarta:Salemba Empat.

Warfield, Kieso waygadnt..2017. Akuntansi Keuangan Menengah edisi IFRS. *Intermediate Accounting*. Jakarta: Saalemba Empat.

Zulhendri, Ferli. *CSR (Corporate Social Responsibilty)* atau tanggung jawab sosial korporasi. Bandung: Alfabeta

https://isharyanto.wordpress.com/derap-ekonomi-publik/csr-sejarah-dan-pertumbuhannya/.

https://inaport4.co.id/

L A M P I R A N

Lampiran 1 .LAPORAN LABA RUGI

	2019	2018	2017
	(RP)	(RP)	(RP)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA	3.661.290.527.559	3.305.799.443.554	3.003.623.037.020
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.122.794.923.785)	(1.872.493.192.829)	(1.648.083.092.882)
LABA KOTOR	**1.538.495.603.773**	**1.433.306.250.725**	**1.355.539.944.139**
PENDAPATAN NON USAHA	139.058.115.853	152.026.353.670	151.029.672.191
BEBAN PEMASARAN	(110.586.081.341)	(110.686.775.886)	(104.950.070.125)
BEBAN UMUM DAN ADM	(861.336304.834)	(768.961.178.177)	(651.849.467.636)
BEBAN NON USAHA	(38.111.338.608)	(154.535.604.092)	(85.595.457.220)
LABA USAHA	**667.516.984.843**	**551.149.046.240**	**664.174.621.349**
BEBAN KEUANGAN	(100.636.423.885)	(68.554.155.132)	**(76.279.362.824)**
LABA SEBELUM PAJAK	**556.880.570.959**	**482.594.891.109**	**587.895.258.525**
BEBAN (PENGHASILAN PAJAK)			
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(148.106.880.875)	(159.361.614.272)	(170.072.801.963)

MANFAAT PAJAK TANGUHAN	16.094.479.035	2.969.918.065	10.726.297.621
JUMLAH BEBAN PAJAK	**(128.012.401.840)**	**(156.391.696.207)**	**(159.346.504.342)**
LABA TAHUN BERJALAN	**438.868.169.118**	**326.203.194.902**	**428.548.754.184**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
***POS-POS YG TIDAK AKAN DIREKLA-**			
SIFIKASI KE LABA RUGI			
PENGUKURAN KEMBALI ATAS PROG-			
RAM IMBALAN PASTI	(11.346.131.021)	3.048.734.995	(9.885.954.755)
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT POS-			
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIK-			
ASI KE LABA RUGI	2.836.532.755	(762.183.749)	2.471.488.689
	(8.509.598.266)	**2.286.551.246**	**(7.414.466.066)**
***POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFI-**			
KASI KE LABA RUGI			
ASET KEUANGAN TERSEDIA DIJUAL	(169.234.700)	(147.776.120)	(194.283.200)
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT POS-			
POS YANG TIDAK AKAN			

DIREKLASIFI-			
KAN KE LABA RUGI	42.308.675	37.771.368	48.750.800
	(126.926.025)	**(110.004.753)**	**(145.712.400)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-			
TAHUN BERJALAN	**(8.636.524.291)**	**2.176.546.494**	**(7.560.178.466)**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHE-			
NSIF TAHUN BERJALAN	**430.231.644.827**	**328.379.741.396**	**420.988.575.717**
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBU-			
SIKAN KE PEMILIK ENTITAS INDUK	438.787.332.440	326.133.143.375	427.849.472.544
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	80.836.678	70.051.527	699.281.639
	430.231.644.827	**326.203.194.902**	**428.548.754.184**
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT			
DI DISTRIBUSIKAN KE:			
PEMILIK ENTITAS INDUK	430.150.808.149	328.309.689.869	420.289.294.078
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	80.836.678	70.051.527	699.281.639
	430.231.644.827	**328.379.741.396**	**420.988.575.717**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	**140.994,65**	**104.795,71**	**137.408,01**

Lampiran 2. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2019	2018	2017
BEBAN IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK	311,711,213,550	270,011,904,587	232,438,712,157
BEBAN GAJI DIREKSI DAN KOMISARIS	85,795,194,256	47,673,062,449	33,462,080,940
BEBAN BAHAN	52,049,783,041	42,159,913,716	39,631,593,997
BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	59,713,225,627	59,862,141,282	42,927,573,164
BEBAN PENYUSUT DAN AMORTASI	81,400,994,888	61,849,070,546	61,806,581,428
BEBAN ASURANSI	2,675,590,793	10,212,555,816	13,465,347,123
BEBAN SUMBER DAYA PIHAK KETIGA	34,982,450,474	64,600,993,433	19,744,469,067
BEBAN KEPELABUHAN			405,134,640
BEBAN IMBALAN PASKA KERJA (IPK)	22,555,929,100	19,294,387,638	
BEBAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9,342,158,107	9,346,687,457	7,352,645,399
BEBAN UMUM	201,112,764,998	183,950,461,253	200,615,329,721
JUMLAH	**861,339,304,834**	**768,961,178,177**	**651,849,467,636**

UNIVERSITAS
BOSOWA